

Pokok Kesimpulan dan Arahan Presiden RI
Rapat Koordinasi Nasional Ke-VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2016

**“Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah guna
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan
Pembenahan Tata Niaga Pangan”**

Jakarta, 4 Agustus 2016

1. **Pemerintah Daerah perlu memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian inflasi.** Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti bila disertai tingkat inflasi yang juga tinggi. Untuk itu, maka peran kebijakan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi melainkan juga pada menjaga stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai inflasi yang rendah dan stabil diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
2. **Pemerintah Daerah harus mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga.** Untuk itu, proses pengadaan atau lelang harus dipercepat dengan tetap memperhatikan tatakelola yang baik. Di samping itu, diperlukan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah agar penyerapan anggaran terdistribusi dengan baik sepanjang tahun dan tidak terkonsentrasi hanya di akhir tahun yang menyebabkan dana APBD di perbankan menumpuk pada periode tertentu.
3. **Pemerintah Daerah agar merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai.** Beberapa terobosan kebijakan antara lain seperti perluasan cakupan komoditas dalam penyelenggaraan pasar murah dan atau operasi pasar, mendorong berkembangnya pasar lelang komoditas pangan, kerjasama penyediaan pangan antar daerah, serta pembangunan dan revitalisasi pasar.
4. **Pemerintah Daerah agar lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan.** Pemerintah Daerah perlu segera menyampaikan kepada Pemerintah Pusat apabila kendala pembenahan infrastruktur tidak dapat diatasi oleh kewenangan daerah.

5. Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk stabilisasi harga yakni dengan:
- segera membentuk forum TPID, khususnya bagi daerah yang belum memiliki TPID; dan
 - bersama-sama penegak hukum untuk melakukan monitoring kewajaran stok pangan di gudang-gudang secara berkala.
6. Pemerintah akan memperkuat kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan: (i) mengoptimalkan peran Bulog dalam pengelolaan stok pangan; (ii) melanjutkan dan memperluas program tol laut disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi pendukung yang diperlukan; (iii) dalam hal impor perlu dilakukan, Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak berimplikasi pada berkurangnya insentif masyarakat untuk memproduksi.

Jakarta, 4 Agustus 2016

Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Komite Kebijakan,

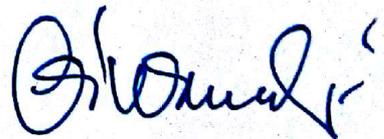
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Direktur Eksekutif
Departemen Kebijakan
Ekonomi dan Moneter
Bank Indonesia

Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri



Bobby Hamzar Rafinus



Juda Agung

Yuswandi A. Temenggung